

Problem Realisasi Kebijakan *Smart City* di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2021, Vol. 11, No. 1: 35-62
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2021

Dwi Wahyu Handayani*

Universitas Lampung, Indonesia

Syafarudin

Universitas Lampung, Indonesia

Lilih Muflihah

Universitas Lampung, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji daya dukung pemerintah dalam mewujudkan *smart city* dengan fokus pada Kota Bandar Lampung, khusus pada aspek tata kelola pemerintahan (*smart governance*) dan modal sosial dan manusia (*smart people*). Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara dan survei. Menggunakan konsep *smart city* dan tata kelola pemerintahan (*governance*), hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *smart governance*, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak sepenuhnya disertai dengan pelibatan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial, dan tidak berbasis pada persoalan masyarakat sesungguhnya sesuai visi dan misi pembangunan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Efektifitas pembangunan infrastruktur tidak maksimal mendukung pelayanan administrasi kependudukan, layanan pendidikan, kesehatan, penyandang persoalan sosial yang terabaikan, dan kerusakan lingkungan. Kelemahan pada aspek *smart governance* memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial dari bekerjanya aspek *smart people*.

Kata-kata Kunci

Smart city, smart people, smart governance

* Penulis untuk korespondensi:

Dwi Wahyu Handayani

Alamat: Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

Email: dwi.wahyu@fisisip.unila.ac.id

Abstract

This article examines government capacity in realizing smart city with a special reference to Bandar Lampung City, Indonesia, especially in the aspects of smart governance and smart people (social and human capital). The method used was qualitative with interviews and survey as data collection techniques. Using the concept of smart city and governance, this article shows that in realizing smart governance, Bandar Lampung government tended to focus on infrastructure development, which did not fully involve the development of the quality of human resources and social capital, and was not based on community problems and the state mission of education and health development. The infrastructure development did not fully provide people with a good quality of administration, education and health services, and neglected social and environmental issues. These problems with smart governance caused the low public trust to government, which was an important social capital of the working of smart people.

Key Words

Smart city, smart people, smart governance

Pendahuluan

Smart city merupakan kota dengan manajemen yang baik dan kecerdasan infrastruktur untuk mengetahui potensi, memahami permasalahan dan melakukan aksi. Tujuan dari adanya *smart city* adalah membentuk kota yang aman, nyaman, *sustainable* (berkelanjutan) dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan (Susanti 2016; Sinergi 2016).

Dalam *smart city*, aspek tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) saling berintegrasi dan bersinergi dengan masyarakat cerdas (*smart people*), yang akan mendukung elemen-elemen *smart city*, yakni ekonomi cerdas (*smart economy*), *smart mobility* (pergerakan yang pintar), lingkungan hidup (*smart environment*), dan *smart living* (kualitas hidup yang lebih baik). Bahkan dalam konsep *governance*, *smart city* mencakup lingkup yang lebih luas dari *government* karena pemerintah (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*) selalu berinteraksi dalam berbagai jaringan, mempertukarkan dan bernegosiasi dalam berbagai sumber daya, masing-masing tetap dengan otonominya (Abdullah 2016).

Keterikatan pemerintahan dan masyarakat adalah sinergi dua arah untuk mewujudkan *smart city*. Pemerintahan yang cerdas terwujud karena partisipasi dan kepentingan masyarakat. Aplikasi tata kelola yang digunakan untuk memberi informasi, mengelola sumber kota, menerapkan transparan dan membuka ruang partisipatif politik dan publik, dan sistem pendidikan yang menciptakan pengetahuan sosial budaya. Di sisi lain, ada perkembangan standar masyarakat karena aplikasi ini mendorong untuk berpartisipasi, menambah tanggung jawab baru untuk perilaku yang lebih cerdas, dan mampu menerapkan aplikasi pintar dalam cara yang benar (Zubizarreta 2015).

Di Indonesia, kebijakan *smart city* di berbagai kota memiliki perbedaan dalam implementasinya sebagaimana pada Tabel 1. Pemerintah kota memiliki kebijakan untuk membuat pilihan prioritas variabel *smart city*, yang signifikan berdampak positif untuk variabel lainnya. Elemen-elemen ini tidak harus semuanya dikembangkan secara bersamaan, namun dapat difokuskan pada satu atau sebagian saja tergantung dengan potensi dan karakter kota tersebut. Sebagian besar *smart city* di berbagai kota melibatkan pengembangan aspek teknologi informasi dengan tujuan memudahkan pelayanan publik disertai dengan aspek kapasitas pemerintah dan masyarakat.

Oleh sebab itu, kami tertarik untuk menelaah ke mana arah kebijakan *smart city* di Indonesia. Untuk tujuan ini, kajian difokuskan pada kebijakan *smart city* Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Lampung ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional dan kawasan andalan nasional yang ada di Sumatera. Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung diharapkan berkembang menjadi *smart city* (kota cerdas) sehingga manajemen pengelolaan kota menjadi efisien, andal dan produktif (“Mendorong Kota Bandarlampung Jadi Smart City”). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung, Ahmad Nur Rizki, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung memahami konsep *smart city* dengan melaksanakan *e-government* sebagai upaya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Aspek tata kelola pemerintahan ini dicanangkan sejak pertengahan tahun 2019 dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung. TIK mempermudah pelayanan dan koordinasi baik kepada masyarakat dan organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meningkatkan keterbukaan publik akan informasi dari seluruh level pemerintah (Wawancara, 21 September 2020).

Kajian ini menggunakan metode wawancara dan survei kepada masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai teknik pengumpulan data yang diperlukan. Kuisisioner survei disebarluaskan secara online kepada 113 responden, yang tersebar di 20 kecamatan, dan mempertimbangkan representasi dari keberagaman agama, etnis, gender, status sosial dan ekonomi. Peneliti menggunakan skala likert dengan kriteria 1-1,9 (sangat kurang), 2-2,9 (kurang), 3-3,9 (cukup), 4-4,9 (baik) dan 5 (sangat baik). Selanjutnya, untuk memperkaya data dalam penelitian yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19 ini, kajian ini dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari berbagai media online.

Smart Governance Kota Bandar Lampung

Pada website www.bandarlampung.go.id tertulis visi pembangunan pada periode 2015-2020 adalah Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Misinya adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, masyarakat agamis, berbudaya, pemerintah yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

Visi dan misi tersebut selaras dengan konsep *smart city*, yaitu mengenai kemampuan kota memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakatnya. Salah satu aspek *smart city* yang dapat digerakkan dalam mencapai visi dan misi tersebut adalah tata kelola yang cerdas (*smart governance*) yang mampu mengintegrasikan antara unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tata kelola merujuk pada pelaksanaan *e-governance*, partisipasi masyarakat dan kepemimpinan publik yang efektif (Govada 2017). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggunakan TIK atau *e-government* dengan tujuan untuk pelayanan publik dan sebagai bentuk kepemimpinan publik yang efektif. Kecakapan dan kecukupan sumber daya aparatur, kejelasan informasi dan kewenangan, demokratisasi dari aparat untuk melaksanakan tujuan, sasaran dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab) paling menentukan dalam implementasi kebijakan *e-government* (Kurniasih 2013).

Pembangunan TIK yang terintegrasi dirintis sejak tahun 2019 dengan alokasi anggaran 20% dari belanja rutin APBD, yang diperkirakan Rp 6 miliar. Pada tahap awal dialokasikan dalam APBD perubahan 2019. Diskominfo Bandar Lampung dalam pelaksanaan *smart city* menggandeng Telecom Energie merancang cetak biru (*blue print*) *smart city* (“Bandar Lampung Menuju Kota Cerdas”).

Pemkot Bandar Lampung tahun 2019 sudah membangun jaringan fiber optik, ruang *server* atau *data center*, yang nantinya seluruh *server* di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terintegrasi di Diskominfo. Selanjutnya, pemkot juga menyediakan kemudahan akses teknologi IT masyarakat dengan layanan wifi gratis di area publik sebanyak 46 titik wifi gratis di beberapa titik di Kota Bandar Lampung. Pemkot juga memiliki portal website resmi, yaitu www.bandarlampungkota.go.id. Website ini pada tahun 2021 diharapkan dapat mengintegrasikan semua website OPD. Tahun 2020, dilanjutkan membangun *command center*. Sarana ini dilengkapi informasi tugas dan kegiatan, *teleconference* untuk koordinasi OPD secara langsung dengan kecamatan bahkan sampai kelurahan, pusat monitoring/pemantauan aktivitas kota, dan layanan pengaduan masyarakat (*call center*) berbasis aplikasi 112. Jaringannya di 20 kecamatan dan kantor dinas yang ada, dengan dilengkapi aplikasi Zoom (Wawancara dengan Kepala Diskominfo Ahmad Nur Rizki, 21 September 2020; Dokumen Diskominfo Kota Bandar Lampung).

Pemkot sebenarnya telah memiliki bekal untuk menjalankan pelayanan berbasis *e-government*, di antaranya kualitas SDM dengan 68 % dari 8.766 ASN Kota Bandar Lampung (tahun 2019) berpendidikan S1. Namun, kualitas pendidikan dan upaya peningkatan SDM aparatur belum sepenuhnya berdampak pada tercapainya prestasi kerja seorang pegawai. Hal itu disebabkan oleh budaya belajar dan praktik pengembangan masih rendah dan tidak mengkaitkan antara aktivitas perencanaan, pelatihan dan penilaian, dan pengembangan kompetensi berorientasi pekerjaan (Effendi 2015).

Selain itu, hasil kinerja birokrasi dan akuntabilitas kinerja belum maksimal. Hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan Pemkot Kota Bandar Lampung pada 2019 mendapatkan nilai B. Kemudian, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemkot Bandar Lampung berstatus CC (58,49) (“SAKIP”). SAKIP adalah integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja akuntabilitas keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, kemampuan menggunakan teknologi informasi adalah menjadi *new job skill* yang wajib bagi ASN dalam menghadapi tantangan masa depan dan menghadapi kondisi tertentu (Widyaningsih 2020) seperti halnya pada masa pandemi. Namun, tidak semua ASN menguasai teknologi (Hadna 2020). Pemkot telah melakukan upaya peningkatan kemampuan IT ASN, di antaranya Diskominfo Kota Bandar Lampung melaksanakan pelatihan website dan multimedia kepada pegawai

Diskominfo (“Dinas Komunikasi dan Informatika Melaksanakan Pelatihan Web dan Multimedia bagi ASN”).

Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan mengikuti proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Dari hasil survei pada Tabel 2, diketahui bahwa warga setuju mengenai pandangan bahwa Musrenbang digunakan untuk pengajuan usulan warga yang akan ditampung di kelurahan, kecamatan, dan kota. Namun, dari sisi pelaksanaan baik pada jadwal, tahapan dan mekanisme Musrenbang, sebagian warga merasa tidak mengetahui.

Selain itu, pelaksanaan Musrenbang kadang bukan prioritas utama dalam pengambilan keputusan untuk program pembangunan. Misalnya, sejak tahun 2017 warga Kecamatan Telukbetung Timur mengusulkan penanganan banjir di wilayahnya melalui Musrenbang (Nugraha 2017). Persoalannya tidak selesai sehingga pada Maret 2020, Kecamatan Telukbetung Timur pada Kelurahan Sukamaju dan Keteguhan mengalami bencana banjir (Sunarya 2020). Selanjutnya, kebijakan pembangunan jalan layang (*flyover*) Mal Boemi Kedaton Jalan Teuku Umar Bandar Lampung tidak memecahkan persoalan kemacetan lalu lintas di jalur itu (Makhya 2017). Akhirnya, kebutuhan masyarakat untuk memecahkan persoalan kemacetan lalu lintas di jalur itu kurang terlihat, kompromi antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan ruas jalan tersebut tidak terlihat karena tertutup oleh isu konflik antara walikota dan gubernur Lampung. Walikota hendak membangun, namun gubernur mencegah dengan alasan yang berbeda. Hal itu karena masing-masing memiliki kepentingan politis terkait rivalitas pada momen Pemilihan Gubernur 2018, di mana keduanya berniat menjadi bakal calon untuk mengikuti kontestasi tersebut dan memiliki kepentingan yang sama untuk mendapat citra positif dari masyarakat Lampung.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan juga belum menyeluruh pada seluruh tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi. Partisipasi aktif masyarakat masih rendah dalam program tersebut sebagai upaya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Hermawan 2017).

Pelayanan Publik dan Sosial

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerima pengaduan mengenai pelayanan OPD Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 72 pengaduan. Paling banyak terkait administrasi kependudukan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Pengaduan lainnya mengenai agraria, air minum, jaminan sosial, kepegawaian, pajak, pendidikan, perhubungan, infrastruktur, dan perijinan (“Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020”). Berdasarkan hasil survei pada Tabel 3 mengenai pelayanan publik dan sosial masih berada pada kriteria cukup, dapat dimaknai bahwa pelayanan publik berbasis teknologi, administrasi kependudukan dan perijinan, penanganan keluhan dan pengawasan belum maksimal. Selain itu, masih ada responden menyatakan masih ada tip atas jasa layanan publik dan alokasi anggaran publik dianggap belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sepanjang kepemimpinan Walikota Herman HN mengalokasikan dana besar untuk infrastruktur (Sulistio 2019). Infrastruktur ini dinilai lebih mendesak oleh Walikota Bandar Lampung, karena berimbas pada percepatan pembangunan dan kemakmuran rakyat kota Bandar Lampung (“Pemkot Bandarlampung Bangun Kembali 8 Kantor Kecamatan dan 4 Gedung RS Unila”). Hingga akhir masa kepemimpinan Herman HN tahun 2020, dana disebut difokuskan pada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan pada 2021, tapi infrastruktur lebih diprioritaskan (“RKPD 2021 Pemkot Bandar Lampung Fokus Bangun Infrastruktur Hingga Perkampungan”). Infrastruktur yang dibangun di antaranya *flyover*, *underpass*, gedung pemerintahan, pasar, dan rumah sakit (“Bandar Lampung Akan Tambah 2 Flyover pada 2020”; “Delapan Tahun Membangun Bandarlampung”). Namun, sebuah riset mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung tidak memperoleh pengaruh secara signifikan dari infrastruktur berupa panjang jalan dan banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang (Aini 2018).

Pada aspek-aspek lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Angka Harapan Hidup (AHP), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan peningkatan. Bahkan, APM SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA lebih tinggi dibanding capaian rata-rata nasional. APK SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA relatif sebanding dengan capaian rata-rata nasional (“Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Bandar Lampung 2018”). Warga

Kota Bandar Lampung telah memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Bagan 1 menunjukkan persentase masyarakat berpendidikan SMA lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya, SD hingga pascasarjana.

Namun, keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah. Ini memengaruhi tingkat pendidikan angkatan kerja, yang dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa angkatan kerja di Bandar Lampung didominasi oleh tingkat pendidikan SD hingga sekolah menengah. Sementara tingkat pengangguran lebih banyak pada lulusan SMA.

Kondisi lingkungan juga terabaikan pada pembangunan di kota Bandar Lampung. Hal memprihatinkan di antaranya minim ruang terbuka hijau (RTH) yang hanya 11,08 persen dari ideal minimal 30%, sungai-sungai tercemar, mengalami penyempitan dan pendangkalan, pengelolaan sampah kurang baik, rentan banjir, dan predikat kota terkotor (“Walhi: Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung Semakin Memprihatinkan.” Kawasan pesisir dipenuhi sampah bahkan laut Lampung juga sudah terkontaminasi dengan limbah industri dan limbah rumah tangga, 33 bukit di Bandar Lampung sudah dieksploitasi dan tidak ada upaya reboisasi (“Aktivis tak Puas Pemaparan Paslon Wali Kota Tangani Lingkungan Hidup”). Selain itu, Bandar Lampung masih menghadapi persoalan air bersih (“Warga di Bandar Lampung Mulai Sulit Mendapatkan Air Bersih”) dan sanitasi yang buruk (“Bandar Lampung Masih Jauh dari Sanitasi Aman”).

Di Kota Bandar Lampung juga masih terdata sejumlah persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Bandar Lampung Dalam Angka Tahun dan 2019 dan 2020. Persoalannya adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (hampir di semua kecamatan), anak korban kekerasan (Kedamaian), tuna susila (Panjang, Kedamaian, Telukbetung Utara), pengemis (Teluk Betung Barat, Panjang), pemulung (hampir di semua kecamatan, mantan warga binaan (Teluk Betung Timur, Panjang, Telukbetung Utara, Enggal), penyalahgunaan Napza (Telukbetung Utara, Tanjungkarang Pusat), orang dengan HIV/AIDS (Panjang), keluarga bermasalah sosial psikologis, anak dengan disabilitas, anak telantar, balita telantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin (hampir semua kecamatan).

Kota Bandar Lampung memang berhasil mewujudkan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari 93,04 ribu jiwa di 2018 turun menjadi 91,24 ribu jiwa di 2019 (“Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020”). Namun, pada data Provinsi Lampung periode Maret 2019 - Maret 2020 (sebelum pandemi Covid 19), garis kemiskinan naik sebesar

8,47 persen yaitu dari Rp 418.309,- per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 453.733,- per kapita per bulan pada Maret 2020. Tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin yang ada di sekitar garis kemiskinan belum dapat mengimbangi kenaikan harga saat kenaikan garis kemiskinan. Perbandingan persentase penduduk miskin Lampung 2016-2020 mencapai 12,34%, lebih tinggi dibanding nasional yaitu 9,78%. Data menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Lampung termasuk Kota Bandar Lampung tetap menjadi persoalan krusial.

Pemerintahan yang Transparan

Kota Bandar Lampung masih memiliki tingkat transparansi dalam kategori sedikit (*scant or none*) atau tidak cukup transparan pada pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitiannya juga mengungkap bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup. Data penelitian tersebut menunjukkan jumlah anggota DPRD Kota Bandar Lampung lebih rendah dibanding pemerintah daerah lainnya yang memiliki keterbukaan informasi. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang cukup banyak diinterpretasikan dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah secara maksimal (Nurhadianto 2019). Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan, pemerintah Kota Bandar Lampung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP) sepuluh kali berturut-turut terhitung sejak tahun 2010 (“Pemkot Bandar Lampung Raih WTP 10 Kali Berturut-turut”).

Upaya transparansi pemerintah yang belum maksimal juga terlihat pada hasil survei di Tabel 5 yang masing-masing indikator masih pada kriteria cukup pada pengetahuan mengenai website pemerintah, keterbukaan program pemerintah dan transparansi anggaran belanja. Upaya transparansi juga dapat ditinjau dari penempatan pegawai. Penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung tanpa adanya detail syarat atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk ditempatkan di suatu jabatan, sehingga penentuan penempatan pegawai atas pertimbangan tertentu (Putri 2017).

Strategi dan Perspektif Politik

Pada sisi kelembagaan, Pemprov Lampung membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Terpadu ini merangkul tokoh adat, berbagai forum lintas agama, organisasi masyarakat, dan berbagai unsur masyarakat, serta

melibatkan TNI/Polri. Berdasarkan peraturan penyelesaian konflik Perda Provinsi Lampung No 1, Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35, Tahun 2016 bahwa pencegahan dan penyelesaian konflik dapat dimulai dari tingkat kelurahan melalui kegiatan rembug (“Peran Gubernur Dalam Meningkatkan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial”). Pemkot Bandar Lampung menghadapi kerentanan pada konflik sosial seperti pendirian tempat ibadah minoritas (“Kasus-Kasus Keagamaan Provinsi Lampung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung”), konflik kepemilikan dan pengalihan fungsi lahan, ketersediaan ruang terbuka hijau (“Merebut Kembali RTH di Bandar Lampung”) dan pemilihan kepala daerah (“Pilkada Bandar Lampung Dinilai Rentan Menimbulkan Konflik”).

Smart People Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 1,033 juta lebih, yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan (“Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Dirinci menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio Tahun 2014-2018”). Keberagaman sosial kota Bandar Lampung dapat dilihat dari sisi etnik, agama, dan kondisi ekonomi. Mayoritas warga Kota Bandar Lampung beragama Islam (93,2%), selebihnya Kristen (3,5%), Katolik (1,7%), dan Budha (1,4%) (“Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Agama per Desember 2019”). Ketersediaan tempat ibadah telah dimiliki oleh semua penganut agama. Dari 1618 tempat ibadah (BPS Kota Bandar Lampung 2020.), tempat ibadah penganut Islam sebanyak 96%, Kristen 2,2%, Katolik 0,5%, Budha 1,1%, dan Hindu 0,5%. Komposisi penduduk berdasarkan etnis memiliki keberagaman di mana pendatang sebanyak 85% dan etnis Lampung sebanyak 15% (Romli 2017).

Data keberagaman ini menunjukkan masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan adaptasi, saling menerima perbedaan dan toleransi yang baik. Hal ini diperkuat dengan hasil survei pada Tabel 6 bahwa responden memiliki kemampuan beradaptasi dan toleransi di tengah keberagaman.

Terkait dengan kesadaran masyarakat tentang keberagaman, seperti terlihat pada Tabel 7, masyarakat cenderung mengapresiasi sikap positif keberagaman dengan aktif dalam komunitas yang plural dan mencari kesepakatan atas kepentingan bersama. Namun, beberapa situasi berpotensi rentan konflik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survei pada pernyataan nomor 1 dan 2 mendapat skor tidak maksimal. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesulitan di antara masyarakat menghadapi perbedaan

pandangan. Pada tahun 2012, data dari Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung bahwa Bandar Lampung menghadapi konflik antarumat beragama, suku, etnis, politik, batas wilayah, sosial, dan antarkelompok (Silvana 2013).

Fleksibilitas merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan dan benturan nilai yang sedang terjadi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan teknologi. Dari survei diketahui bahwa warga memiliki fleksibilitas yang baik ketika dihadapkan pada kemajuan teknologi yang diikuti dengan kesiapan mengakses teknologi dalam kehidupannya.

Demikian juga pada aspek pendidikan, masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki kesadaran yang baik sebagaimana terlihat pada Tabel 9. Masyarakat terbuka terhadap upaya peningkatan kualitas hidup seperti mengikuti forum diskusi, membaca buku, menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan/kursus. Responden setuju untuk ikut dalam organisasi/komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, berinisiatif mengembangkan berbagai potensi masyarakat sekitar, memilih berwiraswasta sebagai mata pencaharian utama, dan mengembangkan produk hasil karya sendiri.

Selanjutnya, dalam hal partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik seperti keterlibatan dalam komunitas, sejak 2014 terdapat sebanyak 165 organisasi masyarakat (Kesumayuda 2019), meskipun yang aktif atau yang masih berlaku hanya 41 yang diketahui melalui pelaporan kegiatan ormas minimal persemester. Responden pada Tabel 10 menunjukkan tingkat partisipasi yang baik, namun belum maksimal pada keikutsertaan dalam musrenbang. Mengenai kreativitas, warga memiliki pandangan positif mengenai kreatifitas. Tabel 11 menunjukkan kesediaan warga mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Selanjutnya, warga Bandar Lampung memiliki modal sosial berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung suasana harmonis dalam keberagaman. Interaksi sosial, masyarakat di Lampung dalam penelitian Abdul Syani (2016) memiliki nilai dan pandangan hidup yang disebut *piil pesenggiri* dan adat *hippun*. *Piil pesenggiri* adalah ramah dan terbuka, suka bergaul, bersahabat, toleran antar sesama, tidak membedakan suku, agama, status, asal usul dan golongan, tolong menolong dan gotong royong. Kearifan lokal adat *hippun* adalah upaya menghimpun atau menjarang aspirasi warga untuk program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Arah Kebijakan *Smart City* Kota Bandar Lampung

Kebijakan *smart city* tidak lepas dari visi dan misi pembangunan kota yang telah dirumuskan sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan. Berdasarkan visi dan misi Kota Bandar Lampung, ada tiga hal prioritas pembangunan, yaitu infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Pemkot Bandar Lampung relevan dengan aspek *smart city*, yaitu tata kelola pemerintahan (*smart governance*) dan mobilitas (*smart mobility*). Aspek pendidikan dan kesehatan relevan dengan aspek *smart people*.

Pemkot Bandar Lampung telah membangun infrastruktur TIK demi merintis pelayanan berbasis *e-government* dan mendukung mobilitas berjejaring masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kesadaran, kecerdasan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi tekanan, guncangan, dan bahaya agar mampu bertahan hidup, beradaptasi, tangguh, dan mampu bertransformasi, sehingga masyarakat mencapai kualitas hidup dan lingkungan yang lebih tinggi, berkelanjutan dalam menghadapi era ketidakpastian masa depan (Arafah 2017). Oleh sebab itu, pembangunan TIK ini menjadi hal yang tepat bagi Kota Bandar Lampung, bukan saja menjadi solusi bagi persoalan saat ini tetapi juga ke depan. Pandemi Covid-19 menjadi contoh tantangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik, layanan berbasis *online* menjadi solusi di tengah tingkat penularan pandemi virus yang tinggi. Kegiatan pembangunan, pelayanan pada masyarakat, dan kegiatan masyarakat termasuk swasta tetap berlanjut dalam berbagai kondisi. *Smart city* justru dapat menjadi efektif dan efisien direncanakan, dilaksanakan, dikelola dan dipantau secara efisien melalui infrastruktur TIK yang terintegrasi oleh orang-orang, perusahaan dan pihak berwenang yang terlibat *smart city*, mengintegrasikan berbagai infrastruktur atau sistem secara vertikal dan horizontal. Untuk alasan ini, mereka kadang-kadang disebut sebagai 'sistem' (Govada 2017).

Kebijakan *smart city* Kota Bandar Lampung tidak sekedar fokus pada pembangunan TIK, tetapi juga mengkaitkannya dengan sumber daya pelaksana kebijakan, perilaku dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini merancang model yang menjadi panduan sistem agar semua elemen *smart city* Kota Bandar Lampung dapat bekerja. Keberhasilan pembangunan *e-government* dan infrastruktur kota sebagai daya dukung *smart city* untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tergantung pada jejaring yang melibatkan sumber daya manusia dan sosial.

Smart city sebagai sebuah sistem yang berintegrasi, berjejaring, dan memiliki mobilitas merupakan bagian dari kapasitas pemerintah untuk mewujudkannya dalam konteks *smart governance*. Kenyataannya, di

Kota Bandar Lampung pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, kualitas hidup masih belum maksimal. Tingkat pendidikan masyarakat Kota Bandar Lampung pada aspek produktif masih didominasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesiapan aparatur dalam menggunakan TIK dan memberikan pelayanan mendapat penilaian belum maksimal. Partisipasi masyarakat juga belum menyeluruh pada semua tahapan proses Musrenbang dan program PNPM. Pemerintah juga belum sepenuhnya menjadikan Musrenbang sebagai dasar prioritas kebijakannya.

Persoalan lainnya adalah kemiskinan di mana masyarakat miskin tidak dapat memperbaiki kualitas hidupnya akibat kenaikan harga barang. Pembangunan pemukiman, infrastruktur fisik, sarana pariwisata, industri tidak memperhatikan dampak lingkungan. Ini menunjukkan arah pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, mengingkari konsep *smart city*. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan dibanding dengan pendidikan dan kesehatan membutuhkan analisa kajian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Proses desain dan perencanaan harus mempertimbangkan nilai-nilai inti kecerdasan sumber daya manusia yang dirancang dan dibangun di skala manusia sesuai dengan masukan, kebutuhan, aspirasi dan preferensi rakyatnya (Govada 2017). Pembangunan manusia justru menjadi hal utama bagi sumber kecerdasan untuk menghasilkan tatanan nilai humanis, partisipatif, demokratis, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang tidak mengabaikan dampak lingkungan.

Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa infrastruktur *e-government* dan pembangunan fisik lainnya yang menjadi prioritas Pemkot Bandar Lampung tidak disertai dengan model kebijakan yang bersinergi dengan aspek manusia sebagai inti dari konsep *smart city*. Pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung tidak berpengaruh secara signifikan oleh infrastruktur berupa panjang jalan dan banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang. Beberapa infrastruktur dibangun dan diperbaiki dengan tidak berbasis pada persoalan masyarakat sesungguhnya, yaitu pendidikan dan kesehatan secara utuh dan komprehensif.

Kelemahan aspek tata kelola (*smart governance*) memengaruhi aspek *smart people*. Kota Bandar Lampung memiliki keberagaman masyarakat, yang teruji mampu beradaptasi, memiliki toleransi, keterbukaan pandangan, saling peduli, sehingga mampu berkolaborasi pada hal yang positif bagi pembangunan. Masyarakat Lampung memiliki modal sosial berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung suasana harmonis dalam keberagaman, yaitu *piil pesenggiri* dan *Hippun*. Nilai-nilai budaya lokal masih melekat dengan baik, sehingga antar komunitas masyarakat

Kota Bandar Lampung memiliki keterikatan satu sama lain. Namun demikian, terkadang masyarakat kota yang beragam ini memiliki potensi rentan konflik berbasis persoalan berbasis agama, etnis, lahan, ekonomi, dan lingkungan.

Unsur-unsur pokok modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), jaringan dan norma. Kepercayaan merupakan modal di mana masyarakat memiliki sikap saling mempercayai untuk dapat membangun suatu jaringan sosial dengan prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*) (Ruslan 2018). Keberhasilan pemerintah adalah ukuran kepercayaan masyarakat. Sebaliknya kegagalan menjadi aspek kerentanan di masyarakat menguat. Oleh sebab itu, perencanaan kebijakan harus merujuk kepada visi dan misi pembangunan yang sebenarnya, yaitu membangun infrastruktur yang seimbang sebagai pendukung visi dan misi pendidikan dan kesehatan sebagai persoalan utama di Bandar Lampung.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam hal *smart governance*, perancangan dan pelaksanaan *e-government* dan infrastruktur fisik lainnya belum sepenuhnya disertai dengan rancangan pelibatan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial, dan tidak berbasis persoalan masyarakat sesungguhnya, yaitu pendidikan dan kesehatan secara utuh dan komprehensif. Oleh sebab itu, efektifitas *e-government* dan pembangunan infrastruktur fisik rentan tidak maksimal mendukung pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, persoalan sosial, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan perkotaan yang tidak terarah dengan baik.

Selain itu, kelemahan pada aspek *smart governance* berbarengan dengan tidak maksimalnya aspek *smart people*. Ketidaksesuaian implementasi visi dan misi pemerintah pada kebijakan pembangunan rentan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat sebagai salah satu modal sosial bagi pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami menyampaikan rekomendasi menuju kebijakan *smart city* yang lebih baik dan tepat di Kota Bandar Lampung. Pertama, perencanaan kebijakan *smart city* Bandar Lampung seharusnya mengacu pada visi dan misi pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai pendukung pembangunan. Prioritas aspek *smart governance* dan *smart people* semestinya tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan nilai

kemanusiaan sebagai elemen dasar sehingga dapat menggerakkan elemen lainnya.

Kedua, penerapan *e-government* pada elemen tata kelola pemerintahan harus beriringan dengan kesiapan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial di masyarakat. Keberhasilan *e-government* meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi tergantung kepada efektifitas sumber daya manusia dan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Terakhir, pemerintah seharusnya memberikan ruang partisipasi masyarakat agar kecerdasan dan nilai-nilai kebaikan dari masyarakat dapat menjadi arah bagi visi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan diarahkan pada kesejahteraan, lingkungan, kemanusiaan, dan keadilan.

Referensi

- Abdullah, Muh. Tang. 2016. "Perspektif Governance dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* 2(1):65-72.
- Aini, Annisa Inayatul. 2018. "Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
- "Aktivis tak Puas Pemaparan Paslon Wali Kota Tangani Lingkungan Hidup." Diakses pada 1 Januari 2021 dari (<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/silviana-4/aktivis-tak-puas-pemaparan-paslon-wali-kota-tangani-lingkungan-hidup/5>).
- Arafah, Y. and H. Winarso. 2017. "Redefining Smart City Concept with Resilience Approach." *The 3rd International Conference of Planning in the Era of Uncertainty. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 70 (2017) 012065, DOI:10.1088/1755-1315/70/1/ 012 065.
- "Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2020". Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
- "Bandar Lampung akan Tambah 2 Flyover pada 2020." 04 November 2019. Diakses pada 28 Desember 2020 dari (<https://www.gatra.com/detail/news/bandar-lampung-akan-tambah-2-flyover-pada-2020>).

- “Bandar Lampung Menuju Kota Cerdas.” 27 April 2019. Diakses pada 26 Desember 2020 dari (<https://www.lampost.co/berita-bandar-lampung-menuju-kota-cerdas.html>).
- “Bandar Lampung Masih Jauh dari Sanitasi Aman.” Diakses pada 23 Desember 2020 dari (<https://m.lampost.co/berita-bandar-lampung-masih-jauh-dari-sanitasi-aman.html>).
- “Delapan Tahun Membangun Bandar Lampung.” 19 Mei 2019. Akses pada 1 Januari 2021 dari (<https://harianmomentum.com/read/15653/delapan-tahun-membangun-bandarlampung>).
- “Dinas Komunikasi dan Informatika Melaksanakan Pelatihan Web dan Multimedia bagi ASN.” Diakses pada 20 Desember 2020 dari (<https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10335-Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Melaksanakan-Pelatihan-Web-dan-Multimedia-Bagi-ASN.html>).
- Effendi, Nur. 2015. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompeten di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.” *Mimbar* 31(1): 1-10.
- Giffinger, Rudolf, Robert Kalasek, Christian Fertner, Natasa Pichler Milanovic. 2007. *Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna UT: Centre of Regional Science.
- Govada, Sujata S, Widemar Spruijt and Timothy Rodgers. 2017. “Smart City Concept and Framework.” Hal. 188-195 dalam T. M. Vinod Kumar (ed.), *Smart Economy in Smart Cities, Advances in 21st Century Human Settlements*. Singapore: Springer.
- Hermawan, Dedy dan Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2017. “Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung.” *Seminar Nasional FH FISIP Universitas Terbuka 2017: Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis*.
- “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015-2019”. BPS Provinsi Lampung.
- “Indikator Strategis Nasional dan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota, 2010 – 2019”. BPS Provinsi Lampung.
- “Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Bandar Lampung 2018”. Diakses pada 27 Desember 2020 dari (<https://bandarlampungkota>).

bps.go.id/statTIKable/2019/12/20/272/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-di-kota-bandar-lampung-2018.html).

- “Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Dirinci menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio Tahun 2014-2018”. Diakses pada 24 September 2020 dari (<https://bandarlampungkota.bps.go.id/statTIKable/2019/12/19/266/jumlah-penduduk-kota-bandar-lampung-dirinci-menurut-kelompok-umur-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-tahun-2014-2018.html>).
- “Kasus-kasus Keagamaan Provinsi Lampung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.” Diakses pada 22 Desember 2020 dari (<https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/SubbagHukumKUB/styq1459757179.pdf>).
- “Kemenko Polhukam Upayakan Tata Kelola Pemerintah Tetap Optimal di Pemkot Bandar Lampung.” 11 Juni 2020. Diakses pada 23 September 2020 dari (<https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-upayakan-tata-kelola-pemerintah-tetap-optimal/>).
- Kurniasih, Dewi, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih. 2013. “Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi.” *Sosiohumaniora* 15 (1): 6-14.
- Lampung sebagai Smart City.” 10 November 2015. Diakses pada 11 Maret 2019 dari (<http://lampungprov.go.id/berita/lampung-sebagai-smart-city.html>).
- “Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020”.
- Makhya, Syarief. 2017. “Analisis Kebijakan Pembangunan Jembatan Layang di Jalan Teuku Umar Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Etika Kebijakan Publik.” *Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*, 18 Oktober 2017, Bandar Lampung.
- “Mendorong Kota Bandarlampung Jadi Smart City.” 18 September 2015. Diakses pada 11 Maret 2019 dari (<http://detiklampung.com/berita-4351-mendorong-kota-bandarlampung-jadi-smart-city.html>).

- “Merebut Kembali RTH di Bandar Lampung.” Diakses pada 22 Desember 2020 dari (<https://hijauku.com/2012/05/11/merebut-kembali-rth-di-bandar-lampung/>).
- Mursalim, Siti W. 2017. “Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 14(1). Diakses pada 13 Maret 2019 dari (https://www.researchgate.net/publication/324251217_Implementasi_Kebijakan_Smart_City_Di_Kota_Bandung).
- Nugraha, Septia. 2017. “Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Telukbetung Timur Bandar Lampung.” *Skripsi*, FISIP Universitas Lampung.
- Nurhadianto, Toni, Nur Khamisah. 2019. “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.” *Jurnal Technobiz* 3(5): 25-30.
- “Pakar: Tidak Semua ASN Kuasai Teknologi.” Diakses pada 10 Juli 2020 dari (<https://www.beritasatu.com/nasional/648867/pakar-tidak-semua-asn-kuasai-teknologi>).
- “Pemkot Bandar Lampung Berupaya Bangun *Smart City*.” 11 September 2019. Diakses pada 22 Februari 2020 dari (<https://lampung.antaranews.com/berita/357020/pemkot-bandarlampung-berupaya-bangun-smart-city>).
- “Pemkot Bandarlampung Bangun Kembali 8 Kantor Kecamatan dan 4 Gedung RS Unila.” 15 Januari 2020. Diakses pada 13 Desember 2020 dari (<https://www.medinaslampungnews.co.id/pemkot-bandarlampung-bangun-kembali-8-kantor-kecamatan-dan-4-gedung-rs-unila/>).
- “Pilkada Bandar Lampung Dinilai Rentan Menimbulkan Konflik.” 11 November 2020. Diakses pada 22 Desember 2020 dari (<https://www.lampost.co/berita-pilkada-bandar-lampung-dinilai-rentan-menimbulkan-konflik.html>).
- “Pemkot Bandar Lampung Raih WTP 10 Kali Berturut-turut.” 1 Juli 2020. Diakses pada 21 Desember 2020 dari (<https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10613-Pemkot-Bandar-Lampung-Raih-WTP-10-Kali-Berturut-turut.html>).
- “Penduduk miskin Lampung 2016-2020”, BPS Lampung 2020.

- “Peran Gubernur dalam Meningkatkan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial oleh Gubernur Lampung 2017”. Bakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Jakarta, 15 Maret 2017.
- Purnomowati, Wiwin dan Ismini. 2014. “Konsep Smart City dan Pengembangan Pariwisata di Kota Malang.” *Jurnal Jibeka* 8(1). Diakses pada 13 Maret 2019 dari (<https://lp2m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Wiwin-Purnomowati-dan-Ismini.pdf>).
- Putri, Almira Devita, Entang AM, dan Candra Dewini. 2017. “Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Administrasi Negara* 2 (1).
- “RKPD 2021 Pemkot Bandar Lampung Fokus Bangun Infrastruktur Hingga Perkampungan.” Diakses pada 22 Desember 2020 dari (<https://www.saibumi.com/artikel-100167-rkpd-2021-pemkot-bandar-lampung-fokus-bangun-infrastruktur-hingga-perkampungan.html>)
- Romli, Khomsahrial. “Dinamika Identitas Budaya Perantau Etnis Minangkabau di Bandar Lampung.” *Jurnal Komunika* 2(1): 29-41.
- Ruslan, Idrus. 2018. “Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik.” *Kalam*, 12 (2): 105-126.
- “SAKIP”. Diakses Pada 23 September 2020 dari (<https://bandarlampungkota.bps.go.id/menu/25/sakip.html>).
- Silvana, Leydi. 2013. “Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung.” *Jurnal Bina Praja* 5 (3): 169-176.
- “Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Agama per Desember 2019”. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2020, BPS Kota Bandar Lampung.
- Sulistio, Eko Budi. 2019. “Government Leadership Competence in the Formulation of Progressive Public Policies (Study of Regional Leadership in Bandar Lampung).” *Jurnal Konsensus* 1 (1): 15-32.
- Sunarya, Adi. 2020. “Banjir Bandang di Telukbetung Timur Merusak Ratusan Rumah.” Diakses pada 20 September 2020 dari (<https://www.lampost.co/berita-banjir-bandang-di-telukbetung-timur-merusak-ratusan-rumah.html>).

- Susanti, Retno. 2016. "Smart Growth, Smart City and Density: In Search of the Appropriate Indicator for Residential Density in Indonesia." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 227:194- 201.
- Syani, Abdul. 2016. "Strategi dan Pendekatan Nilai Kearifan Lokal Lampung dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa." *Seminar Nasional Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung: Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa*.
- "Upaya Mewujudkan *Smart City* di Indonesia." *Sinergi*, Edisi 03 Maret 2016. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.
- "Walhi: Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung Semakin Memprihatinkan." Diakses pada 22 Desember 2020 dari (<https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-kondisi-ekologis-kota-bandar-lampung-semakin-memprihatinkan-1sf08KoUyAW>).
- "Warga di Bandar Lampung Mulai Sulit Mendapatkan Air Bersih." 28 Juli 2019. Diakses pada 1 Januari 2021 dari (<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/28/pvcqu1383-warga-di-bandar-lampung-mulai-sulit-mendapatkan-air-bersih>).
- Widyaningsih, Nanik. 2020. "Pentingnya New Job Skills dan Life Skills bagi ASN dalam Menghadapi Tantangan di Era New Normal." *Jurnal Kewidyaiswaraan* 5 (2): 62-75.
- Zubizarreta, Iker, Alessandro Seravalli, and Saioa Arrizabalaga. 2016. "Smart City Concept: What It Is and What It Should Be." *Journal of Urban Planning and Development* 142(1).

Tabel 1
Kebijakan Smart City Berbagai Kota

| No. | Kota | Fokus | Tujuan | Penelitian/ Sumber |
|-----|-------------|---|---|-----------------------|
| 1 | Kota Malang | SDM dan Iptek (<i>digital city</i>). | Meningkatkan pelayanan dan mendukung pengembangan pariwisata. | Purnomowati 2014 |

| No. | Kota | Fokus | Tujuan | Penelitian/ Sumber |
|-----|----------------|---|--|-----------------------|
| 2 | Kota Bandung | <i>Smart Government dan Smart People.</i> | Memudahkan kegiatan dan mengakses informasi bagi masyarakat. | Mursalim 2017 |
| 3 | Kota Bekasi | <i>Patriot Operation Centre (POC) Smart City.</i> | Akses pelayanan 24 jam, jaminan kepastian hukum proses akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan publik. | Sinergi 2016 |
| 4 | Kota Gorontalo | Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan System Gorontalo <i>Comment Center.</i> | Mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, sistem kerja lebih efisien dan hemat biaya, solusi dan penanganan dengan cepat atas keluhan. | Sinergi 2016 |
| 5 | Kota Magelang | <i>Smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building dan smart energy.</i> | Tata kelola kota yang berkelanjutan. | Sinergi 2016 |

Tabel 2
Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|--|------|----------|
| 1. | Musrenbang dilakukan secara berkala di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. | 3,9 | Cukup |
| 2. | Musrenbang digunakan untuk pengajuan usulan warga yang akan ditampung di kelurahan, kecamatan, dan kota. | 4,2 | Baik |
| 3. | Masyarakat mengetahui informasi tentang pelaksanaan Musrenbang. | 3,6 | Cukup |
| | Rata-rata | 3,9 | Cukup |

Tabel 3
Pelayanan Publik dan Sosial

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik seperti pembuatan KTP, KK, membayar PBB, mendaftar sekolah, informasi layanan rumah sakit secara online. | 3,9 | Cukup |
| 2. | Pemkot Bandar Lampung memberikan layanan administrasi kependudukan, perijinan usaha dengan cepat, tidak berbelit, dan prosedur yang jelas. | 3,9 | Cukup |
| 3. | Pemkot memberikan fasilitas kepada penyandang difabel. | 3,9 | Cukup |
| 4. | Penanganan keluhan terhadap pelayanan diberikan dengan baik . | 3,8 | Cukup |
| 5. | Pengawasan terhadap pelayanan publik berjalan dengan baik. | 3,8 | Cukup |
| 6. | Tak ada pemberian tips atas jasa layanan publik. | 3,7 | Cukup |
| 7. | Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. | 3,9 | Cukup |

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------------|--------------|
| 8. | Masyarakat merasakan langsung manfaat dari program kerja yang dilaksanakan oleh pemkot. | 3,9 | Cukup |
| | Rata-rata | 3,8 | Cukup |

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Lebih Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bandar Lampung 2019

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Bekerja | Pengangguran Terbuka | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sekolah Dasar | 101.674 | 4.232 | 105.906 |
| Sekolah Menengah Pertama | 76.800 | 4.928 | 81.728 |
| Sekolah Menengah Atas | 198.077 | 17.491 | 215.568 |
| Diploma I/II/III/Akademi/Universitas | 98.693 | 9.791 | 108.484 |
| Jumlah | 475.244 | 36.442 | 511.686 |

Sumber: "Kota Bandar Lampung dalam Angka", BPS Kota Bandar Lampung 2020.

Tabel 5

Pemerintahan yang Transparan

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|--|------------|--------------|
| 1. | Masyarakat mengetahui adanya web pemkot Bandar Lampung yaitu https://bandarlampungkota.go.id/new/home_ | 3,8 | Cukup |
| 2. | Penempatan aparat/pejabat pemkot berdasarkan keahliannya. | 3,9 | Cukup |
| 3. | Pemkot bersikap terbuka terhadap program pembangunan yang akan/ sedang dilaksanakan. | 3,9 | Cukup |
| 4. | Adanya transparansi anggaran belanja. | 3,2 | Cukup |
| | Rata-rata | 3,7 | Cukup |

Tabel 6
Pluralitas Sosial dan Etnik

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Menerima keberadaan tetangga yang beda agama, dan aktifitas beribadahnya. | 4,5 | Baik |
| 2. | Mempersilakan teman ataupun tetangga beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. | 4,5 | Baik |
| 3. | Nyaman di dalam kelompok yang beragam dari sisi agama, etnis, bahasa, gender, dan pandangan. | 4,3 | Baik |
| 4. | Berbagi bingkisan kepada siapapun tanpa melihat latar belakang status ekonomi, agama, fisik, suku, bahasa, dsb. | 4,2 | Baik |
| | Rata-rata | 4,4 | Baik |

Tabel 7
Kosmopolitan/Keterbukaan pandangan

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Selisih paham adalah wajar dalam keberagaman. | 3,9 | Cukup |
| 2. | Tidak serta merta mempertahankan prinsip yang dianggap benar ketika berbeda pendapat. | 3,9 | Cukup |
| 3. | Mencari kesepakatan demi tercapainya kepentingan bersama. | 4,5 | Baik |
| 4. | Menghadiri dan aktif pada kelompok yang di dalamnya terdapat keberagaman, dalam hal agama, budaya, suku, ras, bahasa, dan sebagainya. | 4,1 | Baik |
| 5. | Mengajak orang lain ikut berorganisasi . | 4,2 | Baik |
| | Rata-rata | 4,1 | Baik |

Tabel 8
 Fleksibilitas

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Mencari informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi. | 4,5 | Baik |
| 2. | Berbagi informasi yang penting melalui media sosial. | 4,2 | Baik |
| 3. | Mengecek kebenaran informasi yang didapat sebelum dibagikan ke orang lain. | 4,5 | Baik |
| 4. | Menyukai dan menggunakan aplikasi sebagai fasilitas pemenuhan kebutuhan secara online, belanja online, tiket online, komunikasi media sosial. | 4,1 | Baik |
| 5. | Menggunakan <i>mobile banking</i> . | 3,8 | Cukup |
| 6. | Menggunakan layanan jasa agen untuk wisata, dan perjalanan lainnya. | 4,5 | Baik |
| | Rata-rata | 4,3 | Baik |

Tabel 9
 Ketertarikan pada Pembelajaran Seumur Hidup

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Memprioritaskan pengeluaran untuk biaya sekolah | 4,3 | Baik |
| 2. | Ijazah bukan hal utama untuk meraih kesuksesan | 3,9 | Cukup |
| 3. | Berdiskusi dan bertukar pikiran dengan orang lain | 4,6 | Baik |
| 4. | Mengakses e-book ataupun membeli buku | 4,2 | Baik |
| 5. | Meluangkan waktu untuk membaca buku | 3,9 | Cukup |
| 6. | Melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi | 4,5 | Baik |
| 7. | Mengikuti pelatihan/seminar/kursus | 4,2 | Baik |
| | Rata-Rata | 4,2 | Baik |

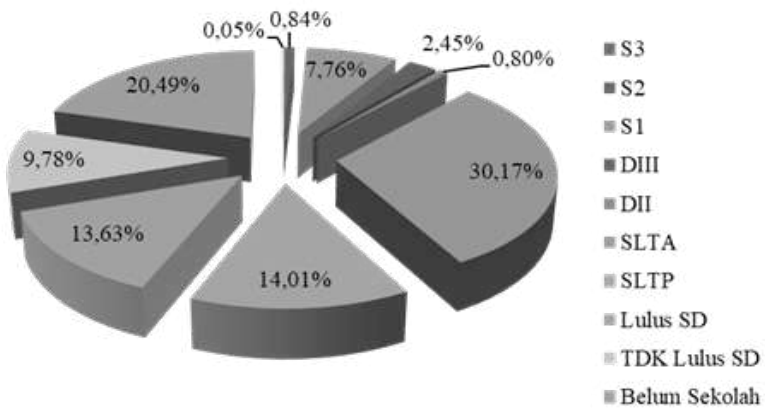
Tabel 10
Keterbukaan Partisipasi dalam Kehidupan

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Hadir pada saat musrenbang tingkat kelurahan. | 3,9 | Cukup |
| 2. | Hadir dan ikut memilih pada pemilihan RT. | 4,1 | Baik |
| 3. | Memberikan saran/kritik kepada RT, lurah, camat, dan pemerintah kota. | 4,1 | Baik |
| 4. | Ikut gotong royong untuk kegiatan di lingkungan tempat tinggal. | 4,4 | Baik |
| | Rata-rata | 4,1 | Baik |

Tabel 11
Kreativitas

| No | Pernyataan | Skor | Kriteria |
|----|---|------|----------|
| 1. | Ikut dalam organisasi/komunitas dalam pemberdayaan masyarakat. | 4,2 | Baik |
| 2. | Berinisiatif mengembangkan berbagai potensi masyarakat sekitar. | 4,2 | Baik |
| 3. | Memilih berwiraswasta sebagai mata pencaharian utama. | 4,2 | Baik |
| 4. | Mengembangkan produk hasil karya sendiri. | 4,2 | Baik |
| | Rata-rata | 4,2 | Baik |

Bagan 1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2020



Sumber: *Data Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2020*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

